

PDS terjemahan ini didasarkan pada versi Inggrisnya yang bertanggal 3 November 2015.



## Indonesia: Program Energi Berkelanjutan dan Inklusif (Subprogram 1)

Nama Proyek	Program Energi Berkelanjutan dan Inklusif (Subprogram 1)
Nomor Proyek	49043-001
Negara	Indonesia
Status Proyek	Disetujui
Jenis / Cara Bantuan Proyek	Pinjaman
Sumber Pendanaan / Nilainya	<b>Pinjaman 3303-INO: Program Energi Berkelanjutan dan Inklusif (Subprogram 1)</b> Sumber daya modal biasa (OCR) US\$ 400,00 juta <b>Pinjaman 8293-INO: Program Energi Berkelanjutan dan Inklusif (Subprogram 1)</b> Dana Infrastruktur ASEAN (ASEAN Infrastructure Fund) US\$ 100,00 juta <b>Pinjaman: Program Energi Berkelanjutan dan Inklusif (Subprogram 1)</b> Bank Dunia US\$ 500,00 juta KfW Bankengruppe US\$ 200,00 juta Agence Francaise de Developpement US\$ 113,00 juta
Agenda Strategis	Pertumbuhan yang menjaga kelestarian lingkungan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif
Pendorong Perubahan	Peningkatan tata kelola dan kapasitas Solusi pengetahuan Kemitraan Pembangunan sektor swasta
Sektor / Subsektor	<b>Energi</b> - Pembangunan sektor energi dan reformasi kelembagaan
Kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender	Tidak ada elemen gender

Uraian	<p>Rancangan Program Energi yang Berkelanjutan dan Inklusif (<i>Sustainable and Inclusive Energy Program, SIEP</i>). SIEP selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang mencakup sejumlah sasaran seperti: (i) perluasan akses listrik bagi semua penduduk Indonesia dan peningkatan konsumsi listrik per kapita dari 843 kilowatt-jam menjadi 1.200 kilowatt-jam per tahun sebagai sasaran penting; (ii) penguatan ketahanan energi domestik melalui peningkatan produksi gas, keamanan yang lebih baik bagi minyak dan produk minyak di hilir, serta peningkatan pemanfaatan energi terbarukan; dan (iii) peningkatan skala efisiensi energi. Program ini juga dirancang untuk mendukung PLN dalam melaksanakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015-2024. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diperlukan upaya berkelanjutan dan bertahap. SIEP akan menjadi operasi ADB pertama yang berbasis kebijakan di Indonesia, yang sepenuhnya difokuskan pada sektor energi. Program yang diusulkan menggunakan pendekatan kronologis selama 5 tahun periode RPJMN dengan tiga subprogram.</p>
<p>Dasar Pemikiran Proyek dan Kaitan dengan Strategi Negara/Regional</p>	<p>Indonesia di bawah presiden dan tim eksekutif yang baru menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 8% pada 2019. Pencapaian target ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk membangkitkan kembali sektor energi yang kinerjanya saat ini masih jauh dari harapan. Sejak beralih dari eksportir bersih energi menjadi importir energi yang cukup besar, Indonesia sampai baru-baru ini belum berhasil membuat kerangka kebijakan yang tepat agar dapat beradaptasi dengan keadaan ini. Pada akhir 2014 sampai awal 2015, pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak dan meningkatkan harga diesel hingga hampir 30%. Pada periode yang sama, pemerintah juga menghapus subsidi tarif listrik dan menjalankan penyesuaian harga otomatis bagi hampir semua kategori konsumen. Selama 2015-2019, pemerintah berupaya mengadakan serangkaian reformasi subsektor dengan tujuan (i) memperluas produksi energi melalui investasi sektor swasta yang lebih besar dan investasi sektor pemerintah yang lebih efektif, (ii) memperkuat keberlanjutan sektor energi dengan semakin mengandalkan gas dan energi terbarukan domestik, serta meningkatkan efisiensi energi, dan (iii) memperluas akses energi bagi semua penduduk Indonesia.</p> <p>Program Energi yang Berkelanjutan dan Inklusif (SIEP) yang diusulkan ini selaras dengan prioritas strategi kemitraan negara ADB 2015-2019 untuk Indonesia serta rancangan</p>

---

dokumen kajian, strategi, dan peta langkah sektor energi, . Kedua dokumen tersebut sedang difinalisasikan. Program tersebut juga selaras dengan kajian tengah waktu (*midterm review*) ADB mengenai Strategi 2020, yang menekankan perlunya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pembangunan infrastruktur, dan keterlibatan berbasis kebijakan di negara-negara berpenghasilan menengah. Dengan berfokus pada serangkaian reformasi subsektor, Program Energi yang Berkelanjutan dan Inklusif meneruskan agenda yang belum selesai, yaitu menerjemahkan reformasi regulasi sektor tingkat tinggi, yang dijalankan selama Program Pembangunan Sektor Reformasi Infrastruktur ADB 2006-2010, menjadi tindakan subsektor berkelanjutan. Program ini dimasukkan dalam draf Country Operations Business Plan 2015-2019.

Investasi yang tidak memadai pada sektor energi. Subsidi yang meluas dan ketidakmampuan untuk memulihkan biaya (*cost recovery*) menyebabkan kurangnya investasi oleh sektor pemerintah. Tarif dan harga pasar yang rendah, serta berbagai tantangan dalam perizinan, pengadaan tanah, persetujuan lingkungan, dan persepsi mengenai risiko keuangan akibat pembeli dari sektor pemerintah yang cenderung memonopoli dan disubsidi, telah menyebabkan rendahnya investasi sektor swasta. Sebagai contoh, rendahnya harga domestik, pembangkit yang sudah menua, dan tidak pastinya kerangka peraturan sehingga menghambat investasi sektor swasta, menjadi kendala investasi pada pasar gas hulu maupun hilir. Pada subsektor kelistrikan, investasi yang relatif rendah semakin diperparah dengan keterlambatan penyelesaian sejumlah proyek pembangkit listrik berbahan bakar minyak, panas bumi, dan tenaga air, skala besar maupun kecil, yang dimulai dalam beberapa tahun belakangan.

Hambatan dalam meningkatkan skala energi terbarukan dan efisiensi energi. Pemanfaatan energi terbarukan masih tertinggal, meskipun berbagai bentuk energi terbarukan tersedia secara melimpah dan telah ada target nasional untuk meningkatkan bentuk energi terbarukan dalam bauran energi primer Indonesia, dari hanya 5% menjadi 25% pada 2025. Kementerian ESDM berupaya menarik investasi sektor swasta ke subsektor energi terbarukan dengan menerbitkan *feed-in tariff* untuk berbagai pembangkit listrik tenaga air skala kecil, biomassa, dan sistem limbah-menjadi-energi, serta harga plafon untuk listrik tenaga surya. Namun, tingkat tarifnya tidak selalu sesuai dan pengembang proyek masih

---

---

menghadapi negosiasi yang sulit dan keterlambatan akibat masalah perizinan. Demikian pula dengan target efisiensi energi yang ditetapkan pemerintah dan diterbitkan sebagai Rencana Induk Konservasi Energi Nasional pada 2005, tetapi hingga saat ini belum diterbitkan pedoman untuk, misalnya, mendorong standar peralatan atau perkakas yang hemat energi dan pelabelannya pada sektor rumah tangga dan komersial. Berbagai persoalan tersebut, ditambah dengan rendahnya biaya energi dalam keseluruhan ekonomi Indonesia, menyebabkan langkah-langkah efisiensi energi dipandang tidak layak secara keuangan.

Hambatan dalam mencapai akses energi modern 100%. Rasio elektrifikasi nasional Indonesia sebesar 84% pada 2014 masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. Di sejumlah pasar kelistrikan yang kecil dan berbagai bagian Indonesia timur, pasokan listrik masih terbatas hanya beberapa jam dalam sehari. Tingginya biaya mengirimkan bahan bakar fosil ke pulau-pulau kecil dan daerah terpencil, dikombinasikan dengan rendahnya beban kelistrikan, terbatasnya kemampuan rumah tangga untuk membayar, kurangnya jaringan interkoneksi yang mampu mendukung unit pembangkit listrik lebih besar, serta lingkungan kebijakan yang penuh kendala, menyebabkan PLN enggan menambah pelanggan baru. Namun, potensi energi terbarukan yang kaya di kawasan-kawasan tersebut dapat mendukung berbagai sistem yang terhubung dengan jaringan, sistem jaringan mini, dan sistem rumah tangga. Secara keseluruhan, upaya elektrifikasi pemerintah belum memiliki kerangka peraturan menyeluruh yang mencakup sektor swasta, program nasional, kerangka kelembagaan, dan sumber daya anggaran yang diperlukan.

Keterlibatan ADB pada sektor energi. Program Energi yang Berkelanjutan dan Inklusif akan memanfaatkan keterlibatan ADB baru-baru ini secara luas di sektor yang berfokus pada tiga bidang: (i) pengetahuan dan kesadaran, (ii) kebijakan dan pengarusutamaan praktik terbaik, dan (iii) pembiayaan infrastruktur energi. ADB mendukung pengembangan (i) rezim tarif baru untuk panas bumi, *photovoltaic* surya di atap, dan sistem angin; (ii) peraturan bagi perusahaan layanan energi; dan (iii) kerangka perencanaan dan peraturan untuk perluasan akses kelistrikan. Kegiatan lainnya terkait pengetahuan termasuk uji coba penyerapan dan penyimpan karbon pertama di Indonesia, dan analisis mengenai prospek penguatan jaringan transmisi di Kalimantan dan interkoneksi

---

---

Sumatera dengan Malaysia. ADB juga terlibat dalam pembiayaan sejumlah pembangkit listrik panas bumi berukuran besar dan jalur transmisi listrik antara Jawa dan Bali, serta antara Sarawak (Malaysia) dan Kalimantan, sekaligus mendukung pinjaman berbasis penghematan energi melalui bank milik pemerintah.

---

Dampak

Sektor energi yang lebih berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Dampak program akan selaras dengan:

(i) Penguatan ketersediaan energi primer untuk penggunaan domestik melalui peningkatan produksi gas (RPJMN 2015-2019).

(ii) Peningkatan jangkauan infrastruktur energi domestik untuk penyediaan kelistrikan dan gas (RPJMN 2015-2019).

(iii) Peningkatan akses ke bentuk-bentuk energi modern bagi berbagai kalangan masyarakat yang masih kurang terlayani (RPJMN 2015-2019).

---

**Hasil Proyek**

Uraian Hasil

Meningkatnya pasokan dari opsi energi yang berkelanjutan dan lebih mudah diakses

---

Kemajuan Menuju Hasil

---

## Kemajuan Pelaksanaan

Uraian Keluaran Proyek	1. Meningkatnya tata kelola sektor 2. Dimungkinkannya pasar untuk partisipasi swasta 3. Meningkatnya akses ke energi bersih
------------------------	---

Status Kemajuan Pelaksanaan (Keluaran, Kegiatan, dan Persoalan)

Lokasi Geografis

## Ringkasan Aspek Lingkungan dan Sosial

Aspek Lingkungan

Pemindahan Bukan dengan Sukarela

Masyarakat Adat

## Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan

Selama Rancangan Proyek

Selama Pelaksanaan Proyek

Pejabat ADB yang Bertanggung Jawab	Pradeep Tharakan
Departemen ADB yang Bertanggung Jawab	Departemen Asia Tenggara ( <i>Southeast Asia Department</i> )
Divisi ADB yang Bertanggung Jawab	Divisi Energi, SERD ( <i>Energy Division, SERD</i> )
Lembaga Pelaksana	<b>Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi</b> <b><u>WIDJANARDO@KIMPRASWIL.GO.ID</u></b> Lantai 2, Jl Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat 10710

## Jadwal

Persetujuan Konsep	-
Pencarian Fakta	-
MRM	-
Persetujuan	-
Misi Kajian Terakhir	-
PDS Terakhir Diperbarui	03 Jul 2015

## Pinjaman 3303-INO

Tonggak					
Persetujuan	Tanggal Penandatanganan	Tanggal Efektif	Selesai		
			Orisinal	Direvisi	Aktual
30 Sep 2015 -	-	-	31 Des 2015	-	-
Rencana Pembiayaan		Pemanfaatan Pinjaman			
	Total (Nilai dalam US\$ juta)	Tanggal	ADB	Lainnya	Persentase Bersih
Biaya Proyek	900,00	Pemberian Kontrak Kumulatif			
ADB	400,00	30 Sep 2015	0,00	0,00	0%
Pendamping	0,00	Pencairan Kumulatif			
Pembiayaan bersama	500,00	30 Sep 2015	0,00	0,00	0%

## Pinjaman 8293-INO

Tonggak					
Persetujuan	Tanggal Penandatanganan	Tanggal Efektif	Selesai		
			Orisinal	Direvisi	Aktual
30 Sep 2015 -	-	-	31 Des 2015	-	-
Rencana Pembiayaan		Pemanfaatan Pinjaman			
	Total (Nilai dalam US\$ juta)	Tanggal	ADB	Lainnya	Persentase Bersih
Biaya Proyek	100,00	Pemberian Kontrak Kumulatif			
ADB	0,00	30 Sep 2015	0,00	0,00	0%
Pendamping	0,00	Pencairan Kumulatif			
Pembiayaan bersama	100,00	30 Sep 2015	0,00	0,00	0%

Lembar Data Proyek (Project Data Sheets/PDS) berisi informasi ringkas mengenai proyek atau program: Karena PDS merupakan pekerjaan yang sedang berjalan, beberapa informasi mungkin tidak disertakan dalam versi awal, tetapi akan ditambahkan setelah informasi tersedia. Informasi mengenai proyek yang diusulkan bersifat tentatif dan indikatif.

ADB memberikan informasi yang terkandung dalam lembar data proyek (PDS) ini semata-mata sebagai sumber daya bagi penggunaannya, tanpa jaminan apa pun. Meskipun ADB berupaya menyediakan konten bermutu tinggi, informasi ini diberikan "sebagaimana adanya" tanpa

jaminan apa pun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk tanpa batasan, jaminan mengenai kelayakan jual, kecocokan bagi tujuan tertentu, dan non-pelanggaran. ADB secara khusus tidak memberikan jaminan atau pernyataan mengenai keakuratan atau kelengkapan informasi yang bersangkutan.